

# BAB I

## PENDAHULUAN

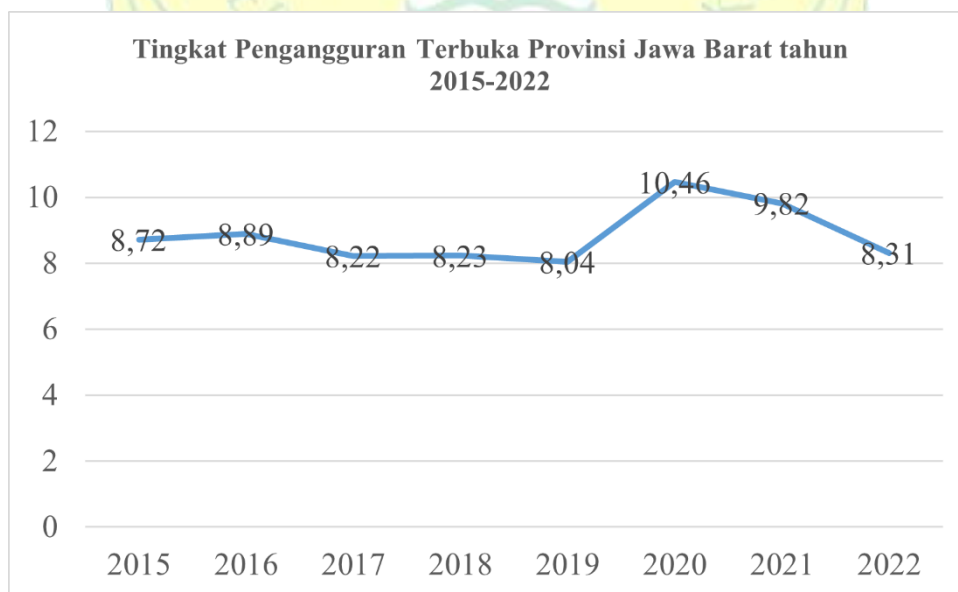
### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara di kawasan Asia Tenggara memiliki pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang bersifat fluktuasi. Berbagai usaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi pun terus dilakukan oleh seluruh pihak, khususnya pemerintah. Berbicara mengenai pembangunan ekonomi, maka akan berkaitan dengan proses perubahan tatanan perekonomian masyarakat karena adanya peningkatan pendapatan masyarakat dengan memperhatikan jumlah penduduk. Hakikat dari pembangunan itu sendiri adalah pembuatan sesuatu yang baru atau melakukan perubahan terhadap sesuatu menjadi lebih baik atau meningkat (Akhmad Syaifuddin Fahlevi, 2014). Dimana pembangunan ekonomi tersebut memiliki makna lebih luas dan mencakup perkembangan susunan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan sesuatu yang penting, karena pembangunan tersebut melibatkan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan – perubahan (Satria & Mubarak, 2019). Pusat pokok bahasan dari ekonomi pembangunan itu sendiri adalah cara untuk mewujudkan transformasi ekonomi di masyarakat (Cypher & Dietz, 2008). Beberapa perubahan yang disinggung yaitu mencakup perubahan terkait struktur ekonomi dan kelembagaan, mulai dari sisi regulasi ataupun reformasi itu sendiri (Satria & Mubarak, 2019). Tujuan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ilham, 2016b). Menurut Suparmoko (2002:5) dalam artikel jurnal yang disusun

oleh Abdul Haris (Jawa et al., 2017) menjelaskan bahwasanya pembangunan ekonomi adalah usaha yang bertujuan dalam meningkatkan kehidupan suatu bangsa yang diukur menggunakan besarnya penghasilan riil perkapita.

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan peningkatan output dan angkatan kerja dalam kegiatan industri. Sehingga hal tersebut mengarah pada peningkatan produktivitas dan jumlah penduduk yang bermigrasi ke daerah perkotaan pun lebih tinggi (Cypher & Dietz, 2008). Adanya peningkatan angkatan kerja juga berdampak terhadap penawaran tenaga kerja semakin besar. Namun permintaan tenaga kerja belum dapat dipastikan meningkat, sehingga akan adanya ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dampak dari ketidakseimbangan tersebut yaitu tingkat pengangguran yang masih termasuk dalam kategori tinggi. Dimana hal tersebut menjadi salah satu permasalahan negara Indonesia mengenai ketenagakerjaan dan berkaitan dengan serapan tenaga kerja serta pengangguran baik langsung atau tidak langsung (Ilham, 2016a). Berlandaskan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka Indonesia rata-rata setiap tahunnya berada di atas 5 persen. Dimana tingginya tingkat pengangguran tersebut akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dikarenakan adanya penurunan penghasilan masyarakat (Wijaya et al., 2014). Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam website BPS, pengangguran terbuka ialah besar persentase perbandingan total pengangguran terhadap total angkatan kerja. Sehingga berdampak tinggi rendahnya tingkat pengangguran di suatu daerah. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian terdahulu menjelaskan tingkat pengangguran dipengaruhi positif oleh angkatan kerja (Zahroh, 2017).

Pulau Jawa merupakan daerah yang mendapatkan pengangguran tertinggi setiap tahunnya, khususnya Provinsi Jawa Barat yang selalu masuk dalam urutan lima tertinggi tingkat pengangguran di Indonesia. Adanya ketidakseimbangan tingkat pengangguran di setiap daerah dipengaruhi pula oleh pengelolaan potensi daerah tersebut oleh pemerintah daerah setempat. Otonomi daerah memberikan perubahan tersendiri dalam tata kelola pemerintahan, dimana pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan potensi dan sumber daya (*resources*) kepada daerah yang telah dimilikinya agar dapat mencapai keseimbangan pengelolaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat (Jawa et al., 2017). Pembangunan ekonomi terdesentralisasi yang merupakan salah satu kebijakan otonomi daerah mengakibatkan adanya ketidakseragaman pembangunan di setiap provinsi bahkan Kabupaten/Kota.



**Gambar 1.1** Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2022

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada gambar 1.1, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya bersifat fluktuasi yang berada di atas angka 8 persen, dengan tingkat pengangguran tertinggi tahun 2020 dan 2021 yaitu 10,46 persen. Sedangkan di tahun 2022, tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia yang menempati peringkat pertama yaitu provinsi Jawa Barat dengan nilai 8,31 persen. Persentase pengangguran yang tinggi dapat disebabkan oleh penambahan angkatan kerja tinggi dan tidak disertai dengan perluasan penyerapan tenaga kerja (Wijaya et al., 2014). Tingkat pengangguran yang tinggi tersebut merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi dan perlu dibenahi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Permasalahan ketenagakerjaan mempunyai keterkaitan yang erat dengan pengangguran karena permasalahan tersebut dapat berdampak pada peningkatan fenomena-fenomena sosial ekonomi pada lingkungan (Ilham, 2016b). Total angkatan kerja meningkat dan tidak diikuti peningkatan lapangan pekerjaan, sehingga berdampak terhadap penciptaan pengangguran (Royati, 2017). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator mengukur ketenagakerjaan di Indonesia (Saputra et al., 2021).

Hal tersebut membuktikan bahwa adanya permasalahan ketenagakerjaan mempunyai keterkaitan pada kesempatan kerja. Dimana kesempatan kerja itu sendiri adalah ketersediaan lapangan kerja bagi para angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (Saputra et al., 2021). Kesempatan kerja adalah indikator dalam menaksir tingkat keberhasilan dan pembangunan daerah (QUYNH, 2021). Ketenagakerjaan tentunya akan berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai

subjek dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dimana ketenagakerjaan tersebut adalah hal dasar dalam kehidupan masyarakat yang mencakup dimensi sosial dan ekonomi yang diarahkan pada peningkatan kesempatan kerja untuk mendorong pembangunan ekonomi (Dona et al., 2018). Upaya dalam keberhasilan pembangunan ekonomi membutuhkan kerjasama efektif dan efisien antar sektor perekonomian (Zulkifli, 2016). Cakupan dimensi sosial pada ketenagakerjaan bersifat secara tidak langsung yang mana dengan adanya peningkatan peluang kerja meningkatkan pendapatan pekerja. Oleh karena itu peluang kerja tinggi maka mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Ketersediaan lapangan pekerjaan mengindikasikan kemampuan para pengusaha dalam mengambil tenaga kerja dan kesempatan kerja mengindikasikan tingginya permintaan tenaga kerja (Asrul, 2013). Serapan tenaga kerja ialah banyaknya lapangan pekerjaan yang sudah penuh dari para tenaga kerja diberbagai sektor perekonomian (Ramdani et al., 2021).

**Tabel 1.1 Persentase penyerapan tenaga kerja Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Angkatan Kerja yang bekerja</b>	<b>Jumlah Angkatan Kerja</b>	<b>% Bekerja/AK</b>
<b>2016</b>	19.202.038	21.075.899	91,11
<b>2017</b>	20.099.220	22.391.003	91,78
<b>2018</b>	20.936.930	22.814.361	91,77
<b>2019</b>	22.063.833	23.993.348	91,96
<b>2020</b>	21.674.854	24.207.930	89,54
<b>2021</b>	22.313.481	24.743.628	91,09
<b>2022</b>	23.452.568	25.578.174	94,50

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan jumlah angkatan kerja Provinsi Jawa Barat selalu meningkat dari setiap tahun, namun peningkatan angkatan kerja memperoleh pekerjaan tidak sebanding dengan peningkatan angkatan kerja tersebut sehingga angkatan kerja



tidak terserap menjadi penyumbang angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut menjadi penyebab masih tingginya angka pengangguran di Jawa Barat. Persentase serapan tenaga kerja Provinsi Jawa Barat terhadap total angkatan kerja setiap tahun mengalami fluktuasi dan berada dibawah angka 95 persen. Faktor daya serap tenaga kerja dipengaruhi tingkat investasi, upah, dan produksi (Liana et al., 2014). Permintaan tenaga kerja penyebab adanya serapan tenaga kerja (Liana et al., 2014).

Permasalahan tersebut tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran Provinsi Jawa Barat. Dimana pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat perlu membangun dan menyediakan lapangan kerja yang luas agar angkatan kerja yang terserap dapat maksimal sehingga tingkat pengangguran menurun. Dalam mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut, berbagai solusi telah dilakukan oleh pemerintah. Peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan sangat penting dalam menunjang terciptanya investasi yang baik dan penerapan strategi pertumbuhan ekonomi pada akhirnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja (Zulkifli, 2016).

Secara teoritis, masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesempatan kerja bisa diatasi menggunakan investasi produktif maksimal (Wijaya et al., 2014). Dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan serapan tenaga kerja, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan investasi. Hal tersebut sesuai dengan investasi yang merupakan penting dalam serapan tenaga kerja. Peningkatan volume produksi mempengaruhi tingkat faktor produksi, terliput tenaga kerja (Wasilaputri, 2014). Investasi melalui Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) langsung maupun tidak langsung mempunyai pengaruh dalam penyerapan tenaga kerja (Royati, 2017). Dimana dengan adanya peningkatan dalam PMA akan meningkatkan pula penyerapan tenaga kerja (FAUZAN, 2021). Investasi di suatu daerah dapat memberikan peluang terhadap penyediaan lapangan pekerjaan sehingga adanya penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut (FAUZAN, 2021). Stok modal yang kian meningkat karena adanya peningkatan investasi, akan mendorong produktivitas, kapasitas, dan kualitas produksi berdampak terhadap peningkatan serapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi (Purba, 2020). Perusahaan akan melakukan kegiatan produksi jika sudah tersedianya faktor produksi salah satunya modal dan tenaga kerja (Ramdani et al., 2021).

Dalam teori ekonomi, Teori Neo Klasik memberikan penekanan terkait urgensi tabungan yang merupakan sumber investasi yang mana investasi tersebut dilihat sebagai salah satu roda penggerak utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Liana et al., 2014). Keterkaitan antara investasi dengan tenaga kerja terdapat dalam teori yang dikemukakan oleh Harrod Domard. Dimana dalam teorinya dijelaskan bahwa investasi berperan penting dalam kegiatan ekonomi untuk menciptakan penghasilan dan meningkatkan kapasitas produksi (Jhingan, 2016). Ketika kapasitas produksi meningkat, sehingga terciptanya lapangan kerja maka berdampak pada tingkat serapan tenaga kerja yang semakin tinggi (FAUZAN, 2021). Teori Harrod-Domar menyatakan pembentukan modal, yang melibatkan pengeluaran, kemampuan produksi barang dan jasa dan merangsang permintaan efektif dalam masyarakat (Liana & Fitriyani, 2020). Investasi tidak hanya

menghasilkan permintaan namun dapat memperluas volume produksi. (Klasik & Smith, 2003).

Hal ini didukung beberapa penelitian terdahulu dalam membahas tentang pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian Abdul Haris berjudul “Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2009-2013” menjelaskan tingkat investasi mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, dimana tingkat investasi mengalami peningkatan maka peluang penyerapan tenaga kerja pun mengikutinya (Jawa et al., 2017). Hasil penelitian Bonaraja Purba yang berjudul “Analisis tentang Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi di Pulau Sumatera, Indonesia”. Peneliti menjelaskan bahwa Investasi PMDN mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja namun investasi PMA berpengaruh signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja (Purba, 2020). Sedangkan menurut penelitian Wasilaputri (2016) yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014”. Peneliti menjelaskan adanya investasi parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Adapun data tingkat realisasi investasi PMDN dan PMA Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016-2021.



**Tabel 1.2 Realisasi investasi PMDN dan PMA Provinsi Jawa Barat**

<b>Tahun</b>	<b>PMDN (Milyar Rupiah)</b>	<b>PMA (Juta US\$)</b>
<b>2016</b>	Rp 30.360,2	5470,9
<b>2017</b>	Rp 38.390,6	5142,9
<b>2018</b>	Rp 42.278,2	5573,5
<b>2019</b>	Rp 49.284,2	5881
<b>2020</b>	Rp 51.400,5	4793,7
<b>2021</b>	Rp 59.948,5	5217,7

Sumber: Diolah oleh penulis

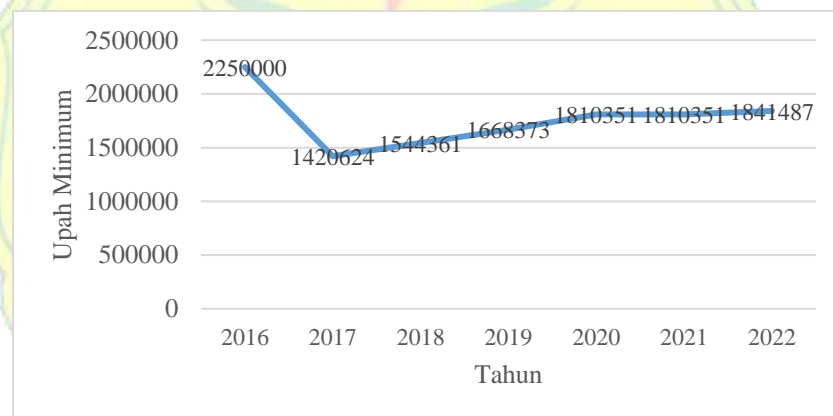
Berdasarkan tabel 1.2 tersebut bahwa nilai investasi PMDN Provinsi Jawa Barat selalu meningkat dari tahun ke tahun walaupun realisasi investasi PMA mengalami fluktuasi. Dimana dengan nilai realisasi investasi PMDN tertinggi pada tahun 2021 sebesar 59 Milyar Rupiah. Di Indonesia sendiri, Provinsi Jawa Barat selalu menempati 5 tertinggi realisasi tingkat investasi PMDN dan PMA. Hal tersebut mengindikasikan bahwa cukup tingginya tingkat investasi di Jawa Barat. Tingginya realisasi investasi di Jawa Barat belum mampu menekan angka pengangguran dan meningkatkan persentase penyerapan tenaga kerja atas total angkatan kerja yang terdaftar di Provinsi Jawa Barat. Pada tabel dan grafik disajikan sebelumnya bahwa tingkat pengangguran di Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Penting untuk dicatat bahwa investasi tidak hanya merangsang permintaan namun juga meningkatkan volume produksi. Menyiratkan bahwa seiring dengan peningkatan volume produksi, kebutuhan tenaga kerja banyak diperlukan, dengan asumsi lapangan kerja penuh.

Faktor upah minimum juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Dimana upah tersebut merupakan harga yang dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja (QUYNH, 2021). Upah merupakan hak pekerja atas hasil kerja yang

dilakukan seseorang terhadap perusahaannya. Meningkatnya permintaan atas barang dan jasa maka akan meningkatkan upah (Widyapangesti & Soelistyo, 2022). Usaha meningkatkan upah perkapita pekerja sehingga rata-rata tenaga kerja dapat meningkat merupakan penerapan kebijakan upah minimum. Kebijakan mengenai upah minimum sebagai faktor yang berpengaruh dalam penyerapan tenaga kerja sudah banyak dilakukan oleh berbagai negara di dunia terutama Indonesia (Bhagaskara et al., 2020). Kebijakan upah minimum tersebut ditetapkan dengan tujuan agar adanya peningkatan upah pekerja yang masih di bawah upah minimum (Susilowati & Wahyuni, 2019). Dimana upah minimum ini selanjutnya menjadi penjamin bagi perusahaan agar pekerja tetap dapat menjaga produktivitas kerjanya (Bhagaskara et al., 2020). Indikator yang cukup penting dalam kesempatan kerja merupakan upah yang terdiri dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Dimana penetapan UMK tersebut berdasarkan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) (Banurea, 2022).

Upah yang berpengaruh dalam penyerapan tenaga kerjanya sesuai dengan pandangan para ekonom Neo Klasik yang menjelaskan pentingnya peran upah dalam pasar tenaga kerja yang ditentukan sama dengan produk marginal tenaga kerja. Hal tersebut juga didukung beberapa peneliti terdahulu yang membahas mengenai pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian Lina dan Dwi tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Industri di Indonesia”. Peneliti menjelaskan upah minimum memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia periode 2012-2017 yang berarti saat kenaikan upah

minimum maka mengakibatkan pengurangan penyerapan tenaga kerja (Susilowati & Wahyuni, 2019). Sedangkan menurut penelitian lain (Rosmayanti, 2021) yang berjudul “Pengaruh Investasi dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil di Kabupaten Gowa”. Peneliti menjelaskan bahwa upah minimum mempunyai pengaruh yang tidak signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga pada industri kecil di Kabupaten Gowa. Upah minimum di Indonesia khususnya Jawa Barat terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat terlihat pada Gambar di bawah ini.



**Gambar 1.2 Grafik upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2022**

Sumber: Diolah oleh penulis

Gambar di atas menunjukkan variasi upah minimum Kabupaten/Kota pada daerah Jabodetabek. Berdasarkan gambar di atas, UMK terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penerapan UMK tertinggi dimiliki oleh Kabupaten dan Kota Bekasi. Hal tersebut disebabkan karena daerah tersebut merupakan kawasan industri. Adanya peningkatan penetapan kebijakan upah minimum baik itu UMP maupun UMK menyebabkan jumlah angkatan kerja Provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Peningkatan upah tenaga kerja bukan hanya untuk

memberikan peningkatan pada kesejahteraan para pekerja, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pasar tenaga kerja (Hanuraga, 2017). Dengan adanya peningkatan upah juga perusahaan akan lebih selektif dalam memilih calon pekerja baru, dan mempertahankan para pekerja yang berkualitas tinggi (Hanuraga, 2017).

Pertumbuhan ekonomi yang termasuk sebagai faktor berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja juga perlu diperhatikan. Sebagai bagian dari tujuan pembangunannya, pemerintah harus memprioritaskan peningkatan pertumbuhan ekonomi (Rezha, 2021). Pembangunan ekonomi bertujuan dalam meningkatkan standar hidup, memperluas angkatan kerja, dan memastikan distribusi pendapatan yang adil, yang diukur dengan variasi pendapatan per kapita riil (Rezha, 2021). Dengan berkembangnya perekonomian, diharapkan laju pertumbuhan ekonomi selalu dapat dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk, sehingga kegiatan perekonomian akan semakin luas dan jumlah pengangguran akan berkurang (Wijaya et al., 2014). Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Demikian pula luas wilayah dapat diukur dengan menggunakan PDRB. Ketika perekonomian tumbuh maka nilai tambah output seluruh pelaku ekonomi di suatu daerah juga akan meningkat (Wasilaputri, 2014). PDRB berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena nilainya tidak dipengaruhi oleh perubahan harga (Irwan, 2015). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat inflasi yang rendah dapat memperluas lapangan pekerjaan baru (Ramdani et al., 2021). PDRB adalah jumlah nilai tambah produksi yang disebabkan adanya beberapa sektor atau

lapangan usaha dalam suatu wilayah tertentu yang kegiatan usahanya dilakukan tanpa pemilihan faktor produksi (Jawa et al., 2017). Dimana kontribusi PDRB tersebut dapat berpengaruh dalam penyerapan tenaga kerja (Jawa et al., 2017). Menurut Mankiw (2007), tingkat pengangguran dengan PDB riil mempunyai hubungan yang negatif (Jawa et al., 2017).

Secara pandangan teori ekonomi klasik Adam Smith, menjelaskan setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat diharapkan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat menurangi pengangguran (Hardini, 2017). Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja diperkuat dengan Hukum Okun (Okuns Law) yang menyatakan jika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi riil dan berada di atas angka 3 persen maka akan menurunkan tingkat pengangguran, begitu pun sebaliknya (QUYNH, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja banyak memberikan hasil positif. Dimana pada hasil penelitian Jonatan Baurea tahun 2022 pada penelitiannya yang berjudul “Pengaruh PDRB, Investasi, dan Upah Minimum terhadap Penyerpan Tenaga Kerja di Kota Medan”. Peneliti menjelaskan bahwa PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Medan (Banurea, 2022). Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Quynh (2021), menjelaskan pertumbuhan ekonomi secara parsial mempunyai pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan indikator PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 ditunjukkan pada tabel di bawah ini



**Tabel 1.3 PDRB ADHK 2010 Provinsi Jawa Barat**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB ADHK 2010 (Juta Rupiah)</b>
<b>2016</b>	1 277 312,17
<b>2017</b>	1 343 662,14
<b>2018</b>	1 419 624,14
<b>2019</b>	1 490 959,69
<b>2020</b>	1 453 380,72
<b>2021</b>	1 507 746,39

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan PDRB Provinsi Jawa Barat meningkat setiap tahunnya, namun tahun 2020 sempat mengalami penurunan akibat adanya peningkatan kasus Covid-19. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kominfo, hingga Desember 2020 jumlah kasus Covid-19 yang terkonfirmasi positif sebanyak 743.198 jiwa (Adam, 2020). Namun pada 2021 pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat mengalami penguatan kembali hingga mencapai 1.507.746 juta rupiah. Hal tersebut mengindikasikan sektor perekonomian provinsi Jawa Barat sudah dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun tingginya tingkat PDRB di provinsi Jawa Barat belum mampu menekan angka pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori klasik Adam Smith dan Hukum Okun yang menjelaskan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Secara teoritis, penyerapan tenaga kerja dipengaruhi beberapa faktor. Namun dalam realisasinya berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja belum maksimal yang diukur dengan tingginya tingkat pengangguran Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan pada latar belakang dan penelitian terdahulu yang menunjukkan inkonsistensi mengenai

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu serta beberapa permasalahan yang telah dijelaskan di atas serta ketertarikan peneliti pada perbedaan penyerapan tenaga kerja Provinsi Jawa Barat sebelum dan selama masa pandemi Covid-19, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dan memperoleh informasi disertai bukti ilmiah yang konkret tentang **“Pengaruh Investasi, UMK, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat”**.

## **1.2. Pertanyaan Penelitian**

- 1) Apakah terdapat pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?
- 2) Apakah terdapat pengaruh UMK terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?
- 3) Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?
- 4) Apakah terdapat pengaruh pandemi covid-19 terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?
- 5) Apakah terdapat pengaruh Investasi, UMK, pertumbuhan ekonomi, dan pandemi covid-19 terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?

### 1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh UMK terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh pandemi covid-19 terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh Investasi, UMK, pertumbuhan ekonomi, dan pandemi covid-19 terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis.

#### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan digunakan sebagai sumber informasi ilmiah dalam penelitian serta sebagai dasar acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dalam analisis pengaruh investasi, UMK, pertumbuhan ekonomi, dan *dummy* covid-19 terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.

#### 2) Manfaat Praktis

##### a) Bagi Pemerintah

Penelitian diharapkan memberikan bukti ilmiah mengenai faktor-faktor mempengaruhi penyerapan tenaga kerja Provinsi Jawa Barat sehingga

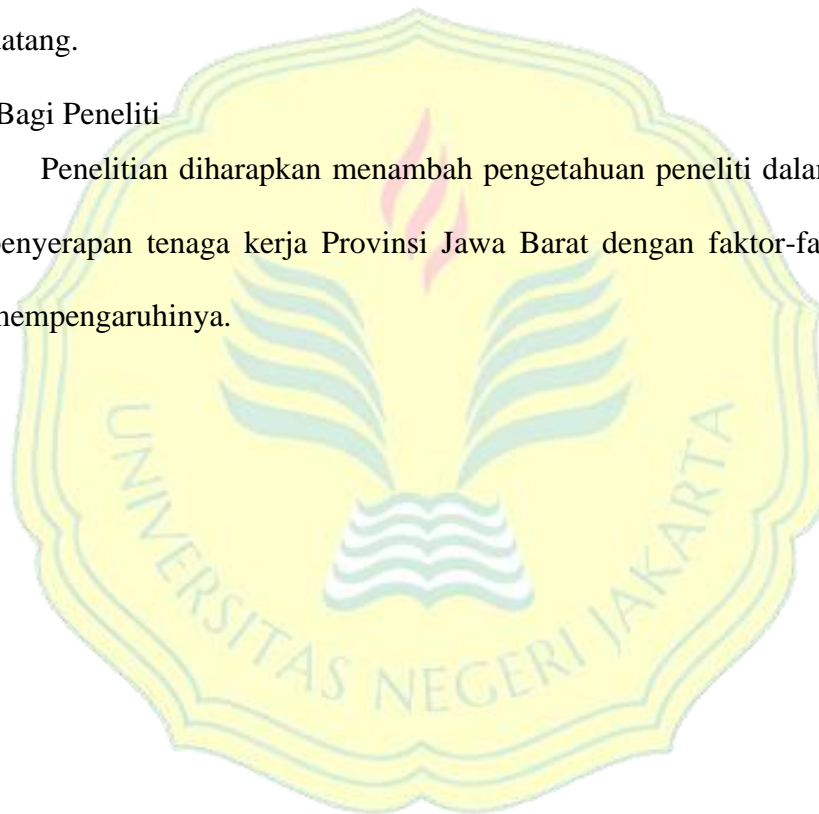
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja provinsi Jawa Barat.

b) Bagi Universitas

Penelitian diharapkan menambah koleksi kepustakaan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam penelitian yang akan datang.

c) Bagi Peneliti

Penelitian diharapkan menambah pengetahuan peneliti dalam analisis penyerapan tenaga kerja Provinsi Jawa Barat dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.



*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*